

RENCANA KINERJA TAHUNAN

(REVISI)



**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN**

Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan

Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948

Email : kcp.banjarmasinnew@yahoo.co.id / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id



2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-NYA atas tersusunnya Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.



Penyusunan Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini dilakukan karena adanya Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang mengakibatkan perlunya penyesuaian pada Rencana Aksi Program Ditjen P2P 2020 – 2024 dan Rencana Aksi Kegiatan Satker.

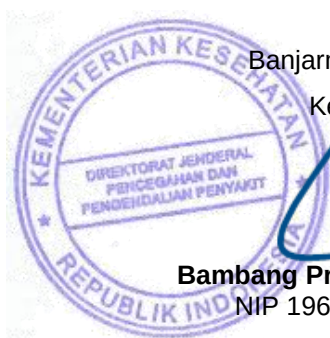
Dengan tersusunnya Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini penetapan indikator kinerja kegiatan lebih memenuhi kriteria *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound)* sehingga hasil capaian kinerja terukur secara tepat, akurat, dan akuntabel.

Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik untuk penyempurnaan rencana kinerja yang lebih baik dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kinerja ini.

Akhirnya kami berharap agar Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2022 dan bahan evaluasi atas indikator kinerja kegiatan dan target pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 agar lebih relevan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan program kegiatan.

Banjarmasin, 15 Juli 2022

Kepala Kantor,



Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penulisan	4
II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	5
A. Capaian Indikator Kinerja TA. 2020	5
B. Alokasi Anggaran TA. 2020	5
C. Realisasi Anggaran TA. 2020	6
D. Rencana Tindak Lanjut TA 2020.....	7
E. Capaian Indikator Kinerja TA. 2021	8
F. Alokasi Anggaran TA. 2021	9
III. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022	11
A. Target Indikator Kinerja Kegiatan	11
B. Rencana Kegiatan	12
C. Alokasi Anggaran Kegiatan	17
IV. KESIMPULAN.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	5
Tabel 2	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2020	6
Tabel 3	Perbandingan Antara Realisasi Anggaran dan Capaian Output Kegiatan Tahun. 2020	6
Tabel 4	Perbandingan Antara Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	7
Tabel 5	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	8
Tabel 6	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2021	9
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Klasifikasi Rincian Output Kegiatan Tahun 2021 (Bulan Juni 2021)	9
Tabel 8	Perbandingan Antara Alokasi Anggaran dan Target Indikator Kinerja Kegiatan..... Tahun 2021 (Bulan Juni 2021)	10
Tabel 9	Perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dan 2022	11
Tabel 10	Revisi Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2022	12
Tabel 11	Alokasi Anggaran Per Kegiatan, KRO dan RO Tahun 2022	18
Tabel 12	Perbandingan Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu cermin indikator utama keberhasilan pembangunan Indonesia. Hal ini mengingat *Human Development Index (HDI)*, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai faktor utama dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Perencanaan dan anggaran Program P2P disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA–KL) yang didalamnya memuat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024.

Tahun anggaran 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Program P2P dalam periode pembangunan kesehatan lima tahunan periode 2020-2024. Pada akhir tahun periode ini semua target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra harus dapat dicapai.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program P2P selama tahun 2020-2021, menunjukkan bahwa rata-rata target indikator kinerja kegiatan telah dapat dicapai, walaupun dalam kondisi pandemic COVID-19 yang merebak sejak awal tahun 2020, kegiatan tetap dapat terlaksana karena adanya usaha dan kerja keras dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penyesuaian beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, meskipun hampir semua ASN dan Non ASN diterjunkan dalam penanganan pandemic COVID-19. Namun masih terdapat beberapa target indikator yang belum tercapai karena terkait dengan faktor penilaian dari eksternal satker. Kegiatan dengan target yang telah tercapai harus terus dipertahankan. Sedangkan kegiatan dengan target belum tercapai harus dilakukan usaha lebih keras melalui berbagai terobosan maupun kegiatan inovatif atau perubahan dalam sistem penganggaran.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan rencana kegiatan untuk mengatasi segala permasalahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, maka KKP Kelas II Banjarmasin memandang perlu melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan agar penyusunan rencana

kerja anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya yang dilaksanakan dapat lebih terarah.

Namun, seiring dengan berbagai kebijakan dalam pembangunan Kesehatan, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, adanya revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI, hasil revaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan masih ada indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi metode SMART (*Specific, Measurable, Attainable/Achievable, Relevant, Time Bound*), serta pemahaman terhadap sumber data indikator kinerja kegiatan untuk setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan masih belum sama, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau revisi Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan pada Bulan Agustus 2021. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko di pintu masuk.

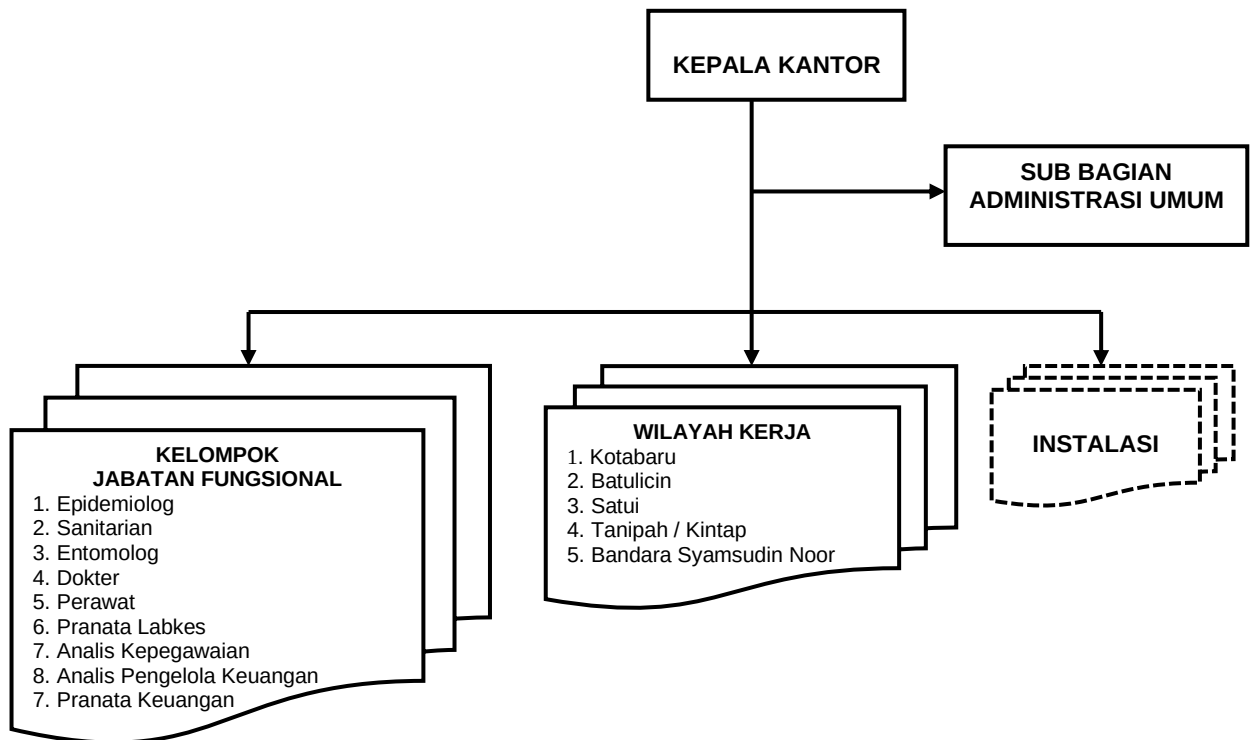
B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan rencana kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menyebabkan Wabah;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
20. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi International;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/Per/IV/2003 tentang persyaratan rumah makan dan restoran;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman penyehatan sarana bangunan umum;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/ Menkes/Per/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLBD;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
34. International Health Regulation 2005.

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan 2022 KKP Kelas II Banjarmasin terdiri dari :

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, struktur organisasi KKP Kelas II Banjarmasin dan sistematika penulisan.

4. BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang hasil pencapaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2020 dan target kinerja Tahun 2021, meliputi capaian indikator kinerja, capaian pelaksanaan anggaran dan rencana tindak lanjut.

5. BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Bab ini menguraikan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan serta rencana dan alokasi anggaran kegiatan tahun 2022.

6. BAB IV KESIMPULAN

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP Tahun 2020 Kelas II Banjarmasin serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA. 2020

Penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin dilaksanakan berpedoman pada rencana aksi kegiatan pada tahun 2020 - 2024. Setiap pelaksanaan kegiatan memiliki target indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2020 indikator kinerja kegiatan mengalami revisi menyesuaikan dengan perubahan indikator rencana program Ditjen P2P. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaaan kesehatan	1,001,644	2,088,592	209
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	100%	111
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	80%	190,91%	239
2	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	Nilai kinerja anggaran	80	87.87	110
		Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	100%	125
		Kinerja implementasi WBK satker	70	70.87	101
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	47.73%	106

B. ALOKASI ANGGARAN TA. 2020

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan baik bersifat teknis maupun administratif dan biaya yang digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16,348,746,000,-.

Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan Tahun 2020 berdasarkan sumber pembiayaan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2020

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran TA 2020
1	Rupiah Murni (RM)	12.883.176.000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3.465.570.000
	Jumlah	16.348.746.000

C. REALISASI ANGGARAN TA. 2020

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2020, KKP Kelas II Banjarmasin memperoleh capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Antara Realisasi Anggaran dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2020

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P							
1	2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,085,552,000	1,068,541,258	98.43	1	1	100
2	2063.994	Layanan Perkantoran	12,284,444,000	11,686,422,108	95.13	1	1	100
	Sub Jumlah		13,369,996,000	12,754,963,366	95.40			
B.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk dan Wilayah							
1	4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit dikendalikan di Pintu Masuk	2,978,750,000	2,943,266,105	93,84	2,808	2,808	100
	Sub Jumlah		2,978,750,000	2,943,266,105	93,84			
	Total		16,348,746,000	15,698,229,471	96,02			

Berdasarkan tabel di atas, antara realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin rata-rata berbanding lurus yaitu realisasi anggaran di atas 95% dan realisasi output seluruhnya 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa dapat dilakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi kegiatan untuk mencapai suatu output kegiatan. Total realisasi anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 15,698,229,471,- atau 96,02 % dan realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh output kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar 98,43 %. Sedangkan realisasi

anggaran terendah dicapai oleh output kegiatan Layanan Pengendalian faktor Risiko Penyakit Dikendalikan di Pintu Masuk sebesar 93,84 %.

Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Antara Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	1,001,644	2,088,592	209	2,811,599,000	2,780,586,705	98,90
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	100%	111	131,391,000	126,975,800	96,64
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	80%	190,91%	239	35,760,000	35,703,600	99.84
2	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4. Nilai kinerja anggaran	80	87.87	110	12,768,806,000	12,171,137,343	95.32
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	100%	125	71,280,000	67,563,650	94.79
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	70.87	101	382,270,000	370,336,510	96.88
		7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	47.73%	106	147,640,000	147,216,353	99.71

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran per indikator kinerja kegiatan rata-rata lebih dari 100 % terealisasi. Untuk realisasi anggaran rata-rata per indikator > 95 % dan realisasi anggaran yang tertinggi yaitu pada indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara sebesar 99,84 %. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan sebesar 94,79 %. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya sinergitas dari semua pengelola program dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih optimal.

D. RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN TA. 2020

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dari bulan Januari – Desember 2020 terlihat bahwa pencapaian masing-masing indikator secara umum rata-rata tercapai > 100%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja agar berkesinambungan hingga tahun-tahun berikutnya, maka diperlukan rencana tindak lanjut untuk kegiatan yang belum tercapai atau yang memerlukan upaya optimalisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan advokasi dengan lintas sector dan lintas program terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi dari pengelola program kantor induk ke pengelola program di wilayah kerja pelaksanaan program kegiatan.
3. Peningkatan optimalisasi kegiatan untuk meningkatkan capaian output kegiatan.
4. *Transfer of knowledge* dan inovasi program-program kegiatan oleh pengelola kegiatan yang telah dilatih sehingga dapat meningkatkan system pelayanan dan adanya diferensiasi program kegiatan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
5. Penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana kegiatan secara merata pada seluruh wilayah kerja sesuai kapasitas dan kebutuhan pelaksanaan program di masing-masing wilayah kerja.
6. Komitmen bersama dari pejabat hingga pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan RPK dan RPD yang telah disusun dan disepakati bersama.

E. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA. 2021

Capaian kinerja Tahun 2021 yang dilakukan pendataan hingga bulan Juni 2021 sebelum penyusunan RKT Tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin dilaksanakan berpedoman pada rencana aksi kegiatan pada tahun 2020 - 2024 menyesuaikan indikator rencana program Ditjen P2P. Adapun indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 (Bulan Juni 2021)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2021	Capaian Kinerja Juni 2021	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,808,639	1,171,722	64,78
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	100%	105,26
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%	51.34%	57,04
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	83	42.1	50,72
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93	94.12	101,20
		Kinerja implementasi WBK satker	72	70.87	98,43
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	28.97%	36,21

Dari data tersebut di atas, menggambarkan bahwa rata-rata indikator kinerja kegiatan dapat tercapai di atas 50 %, diharapkan dengan capaian ini nantinya hingga akhir Tahun 2021 dapat tercapai secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

F. ALOKASI ANGGARAN TA. 2021

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan baik bersifat teknis maupun administratif dan biaya yang digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15,510,075,000,-. Kemudian mengalami revisi penambahan anggaran pada tanggal 08 April 2021 menjadi sebesar Rp. 17,366,075,000,- terdapat revisi penambahan anggaran pada tanggal 28 Juni 2021 menjadi sebesar 17,684,075,000,- Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan Tahun 2020 berdasarkan sumber pembiayaan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2021

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran Awal	Revisi Anggaran I	Revisi Anggaran II
1	Rupiah Murni (RM)	12,536,212,000	12,392,212,000	14,710,212,000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2,973,863,000	2,973,863,000	2,973,863,000
	Jumlah	15,510,075,000	17,366,075,000	17,684,075,000

Alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan perbandingan dengan target output kegiatan, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Klasifikasi Rincian Output Kegiatan Tahun 2021 (Bulan Juni 2021)

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output		Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Target KRO	Realisasi KRO	%
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah						
1	4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	873,415,000	43,463,200	4,98	878.500	5,040	0,57
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,103,136,000	208.569,469	18,91	579	232	40,07
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1,275,100,000	70,151,048	5,5	4	1	25
4	4249.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	100,690,000	36,421,600	36,17	10	4	40
	Sub Jumlah		3,352,341,000	417,881,317	12,47			

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output		Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Target KRO	Realisasi KRO	%
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen P2P						
1	4815.EAA	Layanan Perkantoran	12,536,211,000	5,623,738,294	44,86	24	12	50
2	4815.EB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	90,240,000	0	0	2	0	0
3	4815.EAC	Layanan Umum	56,260,000	23,398,500	41,59	2	0	0
4	4815.EAD	Layanan Sarana Internal	842,551,000	277,408,000	32,92	67	46	69
5	4815.EAF	Layanan SDM	322,220,000	13,998,800	4,34	72	15	28
6	4815.EAG	Layanan Hukum	10,040,000	760.000	7,57	1	0	0
7	4815.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10,190,000	0	0	3	0	0
8	4815.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	23,520,000	1,198,000	0	1	0	0
9	4815.EAJ	Layanan Data dan Informasi	120,000,000	88,950,000	74.13	1	0	0
10	4815.FAI	Pemantauan dan Evaluasi dan Pelaporan	203,340,000	48,417,650	23,81	19	11	58
11	4815.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	117,162,000	43,583,775	37,20	4	2	50
	Sub Jumlah		14,331,734,000	6,121,453,019	42,71			
	Total		17,684,075,000	6,539,334,336	36,98			

Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan per indikator kinerja kegiatan kegiatan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Perbandingan Antara Alokasi Anggaran dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 (Bulan Juni 2021)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,808,639	1,171,722	64,78	3,005,821,000	323,116,717	10,75
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	100%	105,26	245,830,000	58,343,000	23,73
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%	51.34%	57,04	100,960,000	36,421,600	36,08
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	83	42.1	50,72	413,580,000	137,367,650	33,21
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	93	94.12	101,20	12,995,924,000	5,944,730,069	45,74
		6. Kinerja implementasi WBK satker	72	70.87	98,43	100,010,00	23,398,500	23,40
		7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	28.97%	36,21	322,220,000	13,998,800	4,34

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

A. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2022 disusun mengikuti kebijakan redesign sistem penganggaran Kementerian / Lembaga merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Hal ini merupakan kunci atas ketertiban, kedisiplinan sistem penganggaran. Rencana Kinerja Tahunan merupakan upaya dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun dan menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan 3 tahun mendatang selama periode jangka menengah. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun untuk melaksanakan kegiatan sesuai sasaran dan target indikator sasaran Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2020-2024.

Pandemic COVID-19 yang merebak sejak Tahun 2020 hingga saat ini, sehingga mengakibatkan adanya perubahan dan perbedaan antara sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan tahun 2020 - 2022, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	2020	2021	2022	Keterangan
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Penguatan Peran dan Fungsi KKP di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
		Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Kebijakan relaksasi IKPA Tahun 2020, sehingga indikator dilakukan perubahan
		Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	Nomenkatur indikator masih belum memenuhi kriteria SMART

No	Uraian	2020	2021	2022	Keterangan
		Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Nomenkatur indikator masih bersifat proses

Adanya perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan tersebut di atas mengakibatkan perubahan pada target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Revisi Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	No	Semula		Menjadi	
			Indikator	Indikator	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1,998,906	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.95
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara	95%	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,80
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85	Nilai kinerja anggaran	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

B. RENCANA KEGIATAN

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus dibarengi dengan penyusunan rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024. Namun, Tahun 2022 terdapat kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga rencana kegiatan Tahun 2022 bersifat sebagai tahap lanjutan pelaksanaan perubahan sistem yang akan mempengaruhi rencana kegiatan pada masa 2 tahun kedepan. Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan KKP Kelas II Banjarmasin pada tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN

- Persentase Orang Yang Diperiksa Sesuai Standar
- Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar
- Persentase Barang Yang Diperiksa Sesuai Standar
- Persentase Lingkungan Yang Diperiksa Sesuai Standar

2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

- a. Faktor Risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada orang
- b. Faktor Risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada barang
- c. Faktor Risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada alat angkut
- d. Faktor Risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada lingkungan

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

- a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
- b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
- c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)
- d. Persentase bandara/pelabuhan Indeks populasi kecoa <2
- e. Persentase bandara/pelabuhan Indeks populasi lalat <2
- f. Persentase bandara/pelabuhan HI perimeter = 0
- g. Persentase bandara/pelabuhan HI buffer <1
- h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan min 3 kali pemeriksaan
- i. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan min 2 kali pemeriksaan
- j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan min 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

4. Nilai kinerja anggaran

Menggunakan aplikasi E-Monev DJA

5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Menggunakan kriteria penilaian nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satker melalui aplikasi OMSPAN

6. Kinerja implementasi WBK Satker

Hasil penilaian Tim Hukormas Ditjen P2P dan Tim Penilai Internal Kemenkes RI

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional

Sedangkan berdasarkan redesain sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan berdasarkan Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) / Rincian Output (RO) / Komponen / Sub Komponen yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
 - a. Pelayanan Publik kepada Masyarakat
 - 1) Pelayanan Kesehatan Haji

- a) Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi (Rapat Koordinasi Persiapan)
- b) Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi (Pemantapan Higiene Sanitasi pangan Penjamah Makanan Catering Haji)
- c) Pelayanan Kesehatan Embarkasi
- d) Pelayanan Kesehatan Debarkasi
- e) Pelayanan Kesehatan Debarkasi (Rapat Evaluasi Pelaksanaan Debarkasi)
- 2) Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/bandara/Lintas Batas
 - a) Pelayanan Vaksinasi
 - b) Verifikasi Terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang Mengajukan Persetujuan Penerbitan ICV
 - c) Pelayanan Mobile Vaksinasi Covid-19
 - d) Pengawasan Terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang Melaksanakan Penerbitan ICV
 - e) Pertemuan Evaluasi LS, LP dan Klinik/RS Penerbitan Dokumen ICV di Wilayah KKP Banjarmasin

b. Pelayanan Publik Lainnya

- 1) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
 - a) Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan Pra Embarkasi
 - b) Pemeriksaan dan Pengendalian Sanitasi Lingkungan Asrama Haji
 - c) Survey dan Pengendalian Vektor dan BPP di Asrama Haji
 - d) Pengawasan / Pemeriksaan Kualitas Air di Pelabuhan dan Bandara
 - e) Pemeriksaan Kualitas Makanan di Pelabuhan dan Bandara
 - f) Pemeriksaan Kualitas Tempat-Tempat Umum di Pelabuhan dan Bandara
 - g) Pemeriksaan Kualitas Udara dan Kebisingan di Pelabuhan dan Bandara
 - h) Pengawasan dan Pengendalian Limbah B3 di Pelabuhan
 - i) Uji Resistensi Insektisida
 - j) Pengelolaan Limbah Medis
- 2) Layanan Pemeriksaan Orang, Barang dan Alat Angkut
 - a) Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan dan Bandara
 - b) Pemeriksaan Alat Angkut, Orang, dan Barang pada Situasi KLB/Wabah KKM
- 3) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara
- 4) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus
- 5) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD
- 6) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes
- 7) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare
- 8) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD
- 9) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria
- 10) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare

- 11) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS
- 12) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB
- 13) Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori II)

c. Sarana Bidang Kesehatan

- 1) Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
 - a) Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP
 - b) Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
 - c) Pengadaan Bahan Alat Bahan Medis dan non Medis Untuk Pelayanan
 - d) Sarana dan Prasarana Penanganan Covid-19

d. Layanan Manajemen SDM Internal

- 1) Pelatihan Bidang Kesehatan
 - a) Peningkatan Kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog
 - b) Peningkatan Kualitas SDM Kualifikasi Karantina Kesehatan dan Sirveilans Epidemiologi
 - c) Peningkatan Kualitas SDM Kualifikasi Tenaga Medis dan Paramedis
 - d) *Refreshing* Tim TGC dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Berpotensi KKM

2. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Koordinasi

- 1) Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Evaluasi Program

b. Layanan Dukungan Manajemen Internal

- 1) Layanan BMN
 - a) Penyusunan Laporan BMN
 - b) Penghapusan dan Pemusnahan BMN
 - c) Penyelesaian Masalah BMN
 - d) Pengelolaan Hibah BMN
 - e) Penyusunan RKBMN
- 2) Layanan Hukum
 - a) Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System
 - b) Inventarisir Dumas dan Pengelolaan UPG
 - c) Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS Ditjen P2P
- 3) Layanan Hubungan Masyarakat
 - a) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
 - b) Desiminasi / Promosi Informasi Kegiatan Melalui Media Cetak
 - c) Implementasi Budaya Pelayanan Prima

- 4) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - a) Reviu Data Klasifikasi UPT
 - b) Penyusunan dan Reviu ABK, Peta dan Informasi Jabatan
 - c) Penyusunan / Monev SOP AP UPT
 - d) Pembangunan Zona Integritas Menuju Satker WBK, Penguatan dan Pendampingan Assessment Penilaian Satker WBK/WBBM
- 5) Layanan Umum dan Perlengkapan
 - a) Langganan Aplikasi *Meeting* Berbayar
 - b) Pengelolaan Kantor BERHIAS
 - c) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
 - d) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Layanan Perkantoran
 - a) Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Satker
 - (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja
 - b) Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan
 - (1) Pelaksanaan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
 - (2) Langganan Daya dan Jasa
 - (3) Pemeliharaan Perkantoran
 - (4) Pelaksanaan Operasional Perkantoran
- c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 1) Sarana Internal
 - a) Pengadaan Peralatan *Health Security*
 - 2) Prasarana Internal
 - a) Pengadaan Lahan Kantor Wilker Batulicin
- d. Layanan Manajemen SDM Internal
 - 1) Layanan Manajemen SDM
 - a) Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai
 - b) Peningkatan Kompetensi Pegawai
 - c) Layanan Mutasi Kepegawaian
 - d) Pembinaan Pegawai
 - 2) Layanan Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen P2P
- e. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 - a) Penyusunan E-Renggar
 - b) Penyusunan RKA-KL

- c) Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran
 - d) Penyusunan RAK
- 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - a) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program
 - b) Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran
 - c) Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006
 - d) Penyusunan Laporan Tahunan Satker
 - e) Penyusunan Laporan Indikator RAK
 - f) Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
 - g) Evaluasi SAKIP
- 3) Layanan Manajemen Keuangan
 - a) Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P
 - 1) Penyusunan Laporan Keuangan (Semester II TA. 2021)
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan Komprehensif (Triwulan III TA. 2022)
 - 3) Penyusunan Laporan Keuangan (Semester I TA. 2022)
 - b) Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P
 - 1) Pencairan Anggaran dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LS,UP,TUP)
- 4) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
 - a) Penataan Persuratan dan Kearsipan
 - b) Penyusutan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P

C. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Anggaran yang direncanakan baik bersifat teknis maupun administratif yang berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2022 telah mengikuti kebijakan redesain sistem penganggaran Kementerian / Lembaga yang merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Alokasi anggaran pada awal tahun sebesar **Rp. 21,812,095,000,-** yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan utama yaitu Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Anggaran mengikuti redesain belanja yang terdiri atas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO)

yang telah ditetapkan. Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 11. Alokasi Anggaran Per Kegiatan, KRO dan RO
Tahun 2022**

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output		Alokasi Anggaran
A.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
1	4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	785,075,000
	4249.QAA.011	Pelayanan Kesehatan Haji	599,096,000
	4249.QAA.012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	187,895,000
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,100,853,000
	4249.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	175,842,000
	4249.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	289,650,000
	4249.QAH.U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	120,000,000
	4249.QAH.U04	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus	174,600,000
	4249.QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	40,318,000
	4249.QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	162,099,000
	4249.QAH.U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	9,093,000
	4249.QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	28,800,000
	4249.QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	20,076,000
	4249.QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	8,960,000
	4249.QAH.U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	15,125,000
	4249.QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	45,550,000
	4249.QAH.U18	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan	10,740,000
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	570,032,000
	4249.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	570,032,000
4	4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	121,720,000
	4249.TBC.001	Pelatihan Kesehatan	121,720,000
	Sub Jumlah		2,577,680,000
B.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
1	4815.AEA	Koordinasi	320,520,000
	4815.AEA.502	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Evaluasi Program	320,520,000
2	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,559,734,000
	4815.EBA.956	Layanan BMN	53,110,000
	4815.EBA.957	Layanan Hukum	10,940,000
	4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	70,680,000
	4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	10,090,000
	4815.EBA.962	Layanan Umum	73,132,000
	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	13,996,665,000
3	4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,269,940,000
	4815.EBB.951	Layanan Sarana Internal	800,000,000
	4815.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	3,469,940,000
4	4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	172,880,000
	4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	62,760,000
	4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	110,120,000

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output		Alokasi Anggaran
5	4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	256,458,000
	4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	115,040,000
	4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	47,990,000
	4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	64,363,000
	4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	29,065,000
	Sub Jumlah		19,234,415,000
	Total		21,812,095,000

Dari Tabel di atas, apabila dibandingkan dengan anggaran Tahun 2021, terdapat perbedaan nomenklatur output dari tahun sebelumnya karena adanya kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran Tahun 2022.

Secara umum yang terlihat jelas terdapat perubahan nomenklatur suboutput kegiatan dan kegiatan terlihat lebih jelas menggambarkan kegiatan yang akan dicapai. Apabila dibandingkan sasaran strategis dan target indikator kinerja kegiatan dengan distribusi alokasi anggaran dapat digambarkan berdasarkan alokasi kegiatan yang sesuai dengan kinerja yang akan dicapai seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Perbandingan Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan / Rincian Kegiatan	Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.95	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk dan Wilayah	2,577,680,000
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%		
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,80		
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	83	Dukungan Manajemen Pelaksanaan program Di Ditjen P2P	19,234,415,000
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90		
		Kinerja implementasi WBK satker	75		
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%		

BAB IV

KESIMPULAN

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin mempunyai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2020, dari 7 indikator kinerja kegiatan, semua tercapai lebih dari 100 % dengan total realisasi anggaran sebesar 96,02 %. Sedangkan Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua periode Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024, penetapan target mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020. Hal ini menyesuaikan dengan hasil capaian Tahun 2020, kondisi pandemi covid dan -19 yang mulai terkendali dan kebijakan lainnya yang ditetapkan selama Tahun 2021.

Hasil capaian kinerja Tahun 2021 hingga Bulan Juni 2021 sebelum disusunnya RKT Tahun 2022, dari 7 indikator kinerja kegiatan tercapai > 70 % dengan total realisasi anggaran sebesar 38,55 %. Berdasarkan hasil capaian ini, hingga akhir Tahun 2021 diperkirakan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan dukungan berbagai sumber daya dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022, yang merupakan tahapan lanjutan dari Tahun 2021 dalam upaya mencapai target indikator kinerja kegiatan hingga akhir tahun 2024 sesuai Rencana Aksi Kegiatan periode 2020-2024. Berbagai penyesuaian telah dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian indikator kinerja program yang sesuai dengan kondisi kebiasaan baru terhadap kondisi pandemi COVID-19. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahun 2022 diharapkan akan menjadi dasar kelanjutan pelaksanaan kegiatan hingga 3 tahun mendatang seiring dengan kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih relevan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan pelabuhan dengan penyelarasan kegiatan hingga level Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dalam upaya mewujudkan visi dan misi Presiden.

Untuk dapat mencapai target kinerja kegiatan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada Tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya, didukung dengan kinerja yang lebih baik, optimal dan profesional, serta penguatan kepatuhan internal dalam pengawasan dan evaluasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini tentunya perlu didukung dengan peningkatan kompetensi kualitas SDM agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.